

# Memahami Keraton Sebagai Pusat Budaya

... Jika membuka khasanah budaya Jawa, serat 'Niti Raja Sasana' misalnya untuk mempertahankan kewibawaan di mata rakyat, setiap pemegang kekuasaan haruslah 'satya-wacana' atau satunya kata dengan perbuatan. Karena sekarang ini, sudah terlalu banyak keteladanan verbal ketimbang keteladanan aktual....

\*\*\*

**ITULAH** penggalan pidato sewindu jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disampaikan dalam Gelar Budaya Rakyat, Desember 1996. Pidato yang hakikatnya adalah mengungkap keprihatinan ketika Budaya Jawa yang salah kaprah telah menyelip ke dalam segenap kehidupan Bangsa Indonesia. Seperti misal ajaran *mikul dhuwur mendhem jero* - yang sering dijadikan contoh - yang semestinya dimaknai menghormati leluhur terutama yang sudah meninggal dengan selalu mengingat kebaikan kemudian ternyata ditafsirkan lain. Karena falsafah Jawa yang *adiluhung* itu kemudian diartikan untuk orang yang masih hidup utamanya pemimpin. Sehingga walaupun ia berbuat salah hendaknya dimaafkan.

Wajar jika waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkap keprihatinannya. Keraton - termasuk Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat - adalah pusat budaya Jawa. Tetapi sebuah kenyataan telah membuat prihatin nurani Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika dirasakan dan dilihatnya bahwa Budaya Jawa mengalami

pergeseran penafsiran yang kemudian sangat merugikan Budaya Jawa sendiri. Kenyataan itulah yang kemudian membuat masyarakat menjadi sangat trauma dengan 'Jawanisasi' yang dilakukan semasa Orde Baru.

Harus diakui bila perkembangan Keraton sebagai pusat kebudayaan dari masa lampau hingga kini, tidak selalu berlangsung mulus. Banyak tantangan yang dihadapi. Sejarawan Universitas Gadjah Mada Prof Doktor Darsiti Soeratman (*Istana sebagai Pusat Kebudayaan: Lampau dan Kini*, 1990: hal 18) menyimpulkan bahwa semakin melemahnya bidang politik maka makin kuatlah keraton sebagai pusat kebudayaan. Dan kebudayaan sendiri dapat menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan aspirasi masyarakat dengan sifatnya yang universal.

Dalam usianya yang sudah mencapai 256 tahun berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini kita tentu tidak dapat melupakan bahwa di zaman Sultan Agung-lah telah dibangun konsep dasar kebudayaan Jawa yang khas. Sekalipun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan Pangeran Mangkubumi tahun 1755 dirancang dengan Budaya Jawa dan Hindu dengan pembaharuan yang mendasarkan pada ajaran dan nilai Islam. Ajaran yang memberikan arahan bahwa manusia hidup berusaha mendapatkan kebahagiaan

**OLEH**

**Fadmi Sustiwi**

demikian pula setelah meninggal. Dengan demikian saat hidup masih perlu usaha menyeimbangkan kehidupan bermasyarakat (*hablu minannas*) dan ikhtiar menuju kehidupan akhir

rat yang bahagia dengan menjalin hubungan dengan Sang Pencipta (*hablu minallah*) dengan ibadah.

Seperti disebutkan GBPH Joyokusumo dalam jumpa pers, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan Pangeran Mangkubumi yang *jumeneng* Sri Sultan Hamengku Buwono I melandasi pembangunannya dengan menata berdasar konsep wawasan integral, kosmofilosofis kejawen yang mencakup dimensi *spasial*: lahir dan batin serta *temporal*: awal dan akhir yang terbuka bagi masyarakat, bangsa dan negara. Yang kalau secara fisik, peneliti Tata Lingkungan Fisik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dari UII Doktor Dradjat Soehardjo menyebut pembangunannya didasarkan atas konsepsi aktivitas kota sebagai pusat pertumbuhan (*central place*) dan aktivitas pendukung (*hinterland*). Sehingga bangunan prasarana fisik sebagai sarana aktivitas juga terdistribusi seimbang antara bangunan keraton dan bangunan di daerah pendukung dalam bentuk *masjid pathok negara*.

Apa makna dan relevansinya semua itu di masa pembangunan sekarang? Kita semua tentu sepakat un-

tuk tidak mengulang masa lalu - sebagaimana diprihatinkan Sri Sultan Hamengku Buwono X di awal tulisan - yang telah 'menjerumuskan' Budaya Jawa dan kemudian menudingkan Keraton sebagai pusat feodalisme. Apalagi menurut sejarawan Prof Doktor Kuntowijoyo (*Album Agung*, hal 46) kecenderungan menunjukkan, sekarang ini keraton telah menjadi demokratik, karena kekuasaannya bukan kekuasaan aktual, namun simbolik.

Agaknya menarik dengan apa yang dikemukakan Darsiti Soeratman (hal 20-21) bahwa apa yang diusahakan Keraton menjadi pusat kebudayaan adalah kebudayaan daerah. Hakikatnya, kebudayaan itu adalah pernyataan sintesa budaya yang telah dikembangkan cukup lama dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Kebudayaan daerah itu merupakan warisan dari hasil perkembangan dialektis dari pelbagai system. Masalahnya, bagaimana segudang warisan itu harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Dan agaknya Keraton - termasuk Ngayogyakarta Hadiningrat - sebagai pusat kebudayaan daerah perlu bekerja keras untuk dapat merealisasikan cita-cita sebagai penyangga pembangunan nasional. Untuk itu, agaknya seperti telah disebut berkali-kali adalah mengadaptasikan diri supaya menjadi kebudayaan yang aktif. □-a

\*) *Fadmi Sustiwi*, Wartawan  
SKH Kedaulatan Rakyat.